



# **PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDEKATAN YURISDIKSI DAN TRANSFER FISKAL**

**Arifin Rudiyanto**

**Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam**

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS**

**Republik Indonesia**

Jakarta, 26 April 2021

# Kondisi Tutupan Lahan selama 20 tahun terakhir



## Kehilangan Tutupan Hutan Per Pulau 2000-2020

**Pulau Sumatera**  
-3.916.000 ha

**Pulau Jawa**  
-270.475 ha

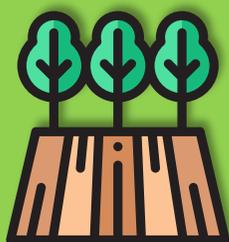
**Pulau Bali**  
+38.050 ha

**Pulau Kalimantan**  
-5.044.725 ha

**Pulau Sulawesi**  
-542.050 ha

**Pulau Maluku**  
-143.850 ha

**Pulau Papua**  
-685.450 ha



Selama 20 tahun terakhir, Indonesia telah kehilangan **10,8 juta ha** tutupan hutan akibat alih fungsi lahan dan kebakaran hutan.

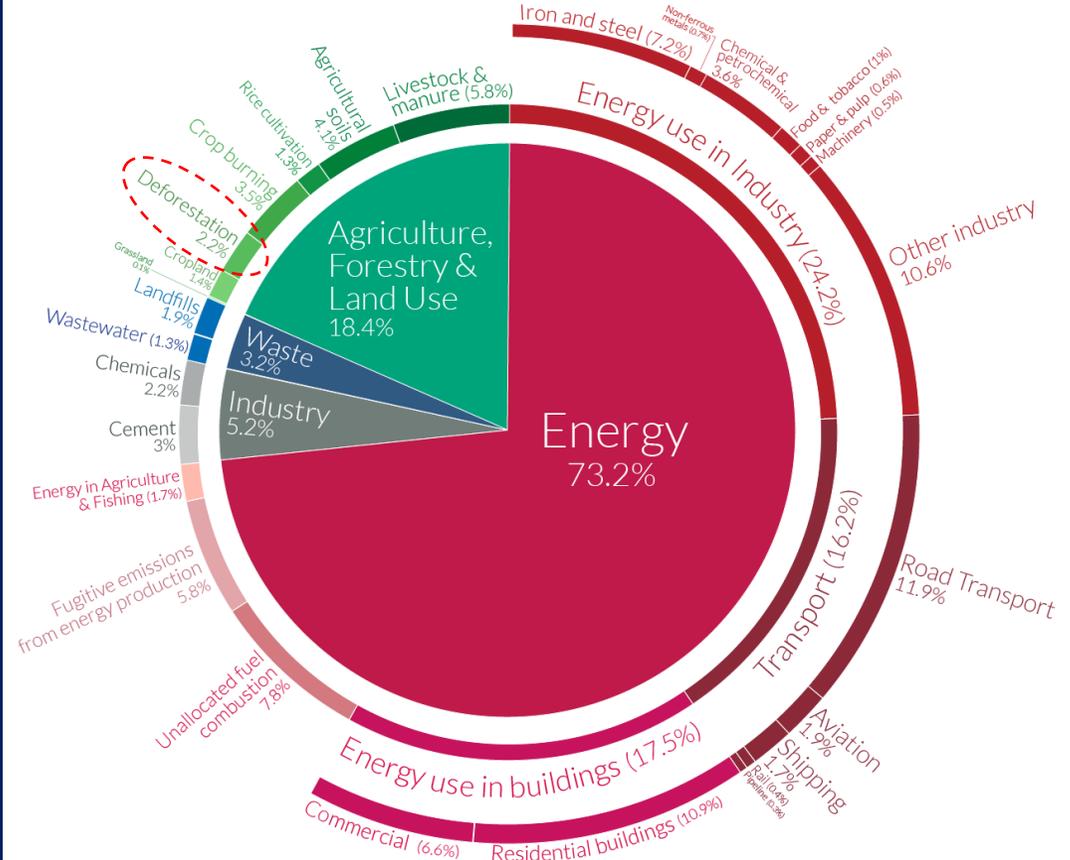
Luas tutupan hutan diperkirakan akan berkurang sebesar **17,2 juta ha** dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2045 jika tidak ada upaya khusus untuk melindungi tutupan hutan.

# Deforestasi dan Pengembangan Kelapa Sawit

Deforestasi merupakan salah satu penyumbang emisi GRK dan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang sering dikaitkan dengan deforestasi

## Global greenhouse gas emissions by sector

This is shown for the year 2016 – global greenhouse gas emissions were 49.4 billion tonnes CO<sub>2</sub>eq. Our World in Data



OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems. Source: Climate Watch, the World Resources Institute (2020). Licensed under CC-BY by the author Hannah Ritchie (2020).

Sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan berkontribusi sebesar **18,4%** dari emisi GRK global, dimana deforestasi sendiri berkontribusi sebesar **2,2%**

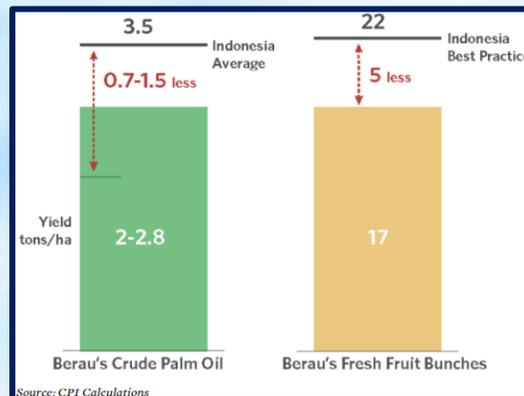
## Strategi Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia

Pengembangan kelapa sawit seringkali dinilai tidak pro pembangunan berkelanjutan karena menyebabkan deforestasi.

Untuk itu, arah pengembangan kelapa sawit perlu diubah menjadi **optimalisasi produksi dan produktivitas tanpa harus memperluas lahan perkebunan** sehingga tidak menyebabkan deforestasi

### Contoh Kasus: Berau, Kalimantan Timur

Yield sawit di Berau yang masih dibawah nilai nasional menunjukkan bahwa optimalisasi perlu diutamakan



### STRATEGI

- Memberi insentif sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan untuk produsen kelapa sawit yang ada
- Mendorong perkebunan kelapa sawit agar lebih efisien
- Menambah nilai produk kelapa sawit sebelum dikirim ke daerah lain
- Diversifikasi produk pertanian
- Mengembangkan industri hilir atau industri berskala rumah tangga

# Kebijakan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan dalam RPJMN 2020-2024

PN  
1

Prioritas Nasional

PN  
6



## Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Melalui (1) peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan (2) peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi



## Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Melalui implementasi Pembangunan Rendah Karbon untuk mencapai potensi pertumbuhan dengan mempertahankan aktivitas rendah emisi

# Arah Kebijakan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan dalam Prioritas Nasional 1

Program Prioritas 3

## Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi

Kegiatan Prioritas

Peningkatan kualitas konsumsi, **keamanan**, fortifikasi dan biofortifikasi pangan

Peningkatan **ketersediaan pangan** hasil pertanian dan pangan hasil laut secara **berkelanjutan** untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok

Peningkatan **produktivitas, keberlanjutan** sumber daya manusia (SDM) pertanian dan **kepastian**

Peningkatan **produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian** dan digitalisasi pertanian

Peningkatan **tata kelola sistem pangan nasional**

Program Prioritas 6

## Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

Kegiatan Prioritas

Peningkatan **industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir**

Arah Kebijakan dan Strategi

- Pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa sawit, kelapa, karet, kayu, rotan, sagu, kakao, kopi, tanaman obat, buah-buahan, florikultura dan rempah-rempah
- Pengembangan indikasi geografis tanaman jamu/obat, standardisasi proses dan produk jamu nasional.
- Pengembangannya juga diperkuat dengan pendekatan **yurisdiksi berkelanjutan**
- Praktik budidaya pertanian berkelanjutan, dan agroforestry

# Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sebagai Platform Nasional Menuju Pencapaian Target SDGs

## Komitmen Indonesia untuk mencapai SDGs pada 2030



## Keterkaitan SDGs dalam implementasi PRK dan PBI



Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim adalah *platform* Nasional untuk mencapai target SDGs, yang menempatkan Goal 13 (perubahan iklim) sebagai sentral, didukung oleh berbagai Goal lain yang tersebar di 3 dari 4 pilar SDGs: Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, dan Pilar Lingkungan.

## Pembangunan Rendah Karbon & Ketahanan Iklim

Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim sebagai agenda prioritas nasional yang telah memiliki target, lokasi dan sektor yang jelas di dalam RPJMN 2020-2024

**Prioritas Nasional 6**  
**Rencana Pembangunan**  
**Jangka Menengah**  
**Nasional (RPJMN)**  
**2020-2024**

# Strategi Pemulihan Lahan Berkelanjutan dalam Pembangunan Rendah Karbon

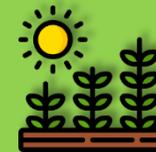
Pembangunan Rendah Karbon adalah pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi Sumber Daya Alam.



Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut seluas **330.000 ha/tahun**



Rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan luas tutupan hutan hingga **420.000 ha/tahun**



Pengurangan laju deforestasi



Peningkatan Produktivitas & Efisiensi Pertanian menuju Pertanian Berkelanjutan melalui LP2B

# Pendekatan Yurisdiksi: Apa dan Bagaimana Statusnya

**Kurangnya kapasitas**  
tata kelola penggunaan  
lahan (*land use*  
*governance*)



**Praktik** tata guna lahan  
**tidak berkelanjutan**  
(contoh: deforestasi,  
dekomposisi gambut)



## Pendekatan Yurisdiksi

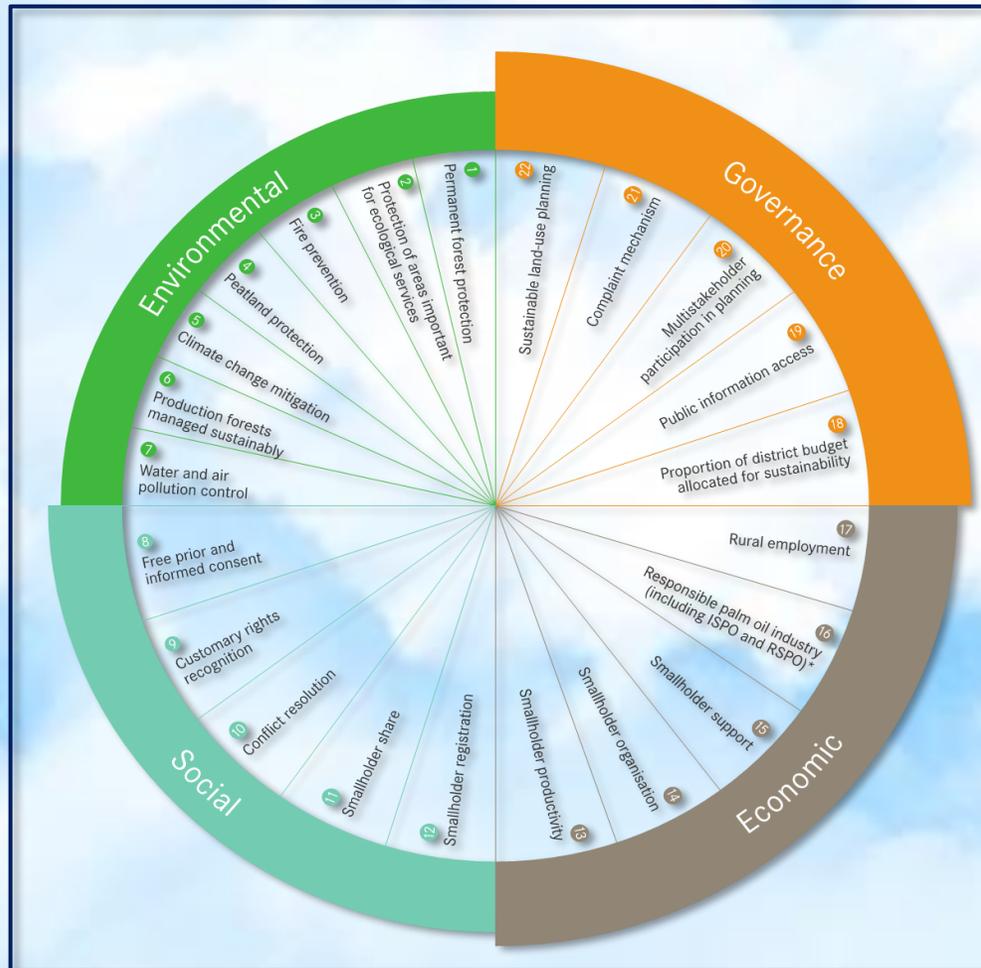
- Mengakomodasi **berbagai pemangku kepentingan**
- Berorientasi pada **outcome**
- Didorong oleh pemerintah daerah melalui **peningkatan kebijakan dan tata kelola**
- Pendekatan **multi-tingkatan**
- **Lintas isu** (hukum, perkebunan, kehutanan, perencanaan spasial, tata Kelola lingkungan, lahan, pembangunan regional)
- Program **kolaboratif**, kerangka pengawasan yang **transparan**

1. Pendekatan yurisdiksi mulai dikenal pada **2014** dalam konteks REDD+, kemudian berkembang menjadi bagian dari upaya peningkatan komitmen rantai pasok bebas deforestasi ([Seymour et. al, 2020](#)).
2. Pada 2020, beberapa **provinsi dan kabupaten telah mengadopsi** konsep pendekatan yurisdiksi di dalam perencanaan pembangunan ([Seymour et. al, 2020](#)).
3. Nota konsep pembangunan pangan dan pertanian dalam **RPJMN 2020-2024** dengan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan menjadi referensi penelitian CIFOR tentang pendekatan yurisdiksi untuk pertanian dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Narasi pendekatan yurisdiksi berkelanjutan disampaikan pada webinar:
  - Tri Hita Karana *Forum Partners Dialogue: Indonesia Omnibus Law for a Better Business Better World* (30 November 2020)
  - *Food Systems and Urban Planning* (23 Maret 2021)
  - Pengembangan Panduan Laporan Keberlanjutan untuk Perusahaan Agrikultur di Indonesia (30 Maret 2021)
4. Meskipun merupakan pendekatan baru, 8% (10) **perusahaan** yang mengisi kuesioner CDP pada 2020 telah terlibat secara khusus dalam bentuk Pendekatan Yurisdiksi. (CDP Indonesian Palm Oil [Report 2020](#)).
5. Bappenas, IPB, GIZ, dan Sekretariat LTKL memfasilitasi seri **Konsultasi Publik** untuk Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi yang dilakukan secara daring. Panduan tersebut dapat diakses melalui situs web [www.perkebunanberkelanjutan.org](http://www.perkebunanberkelanjutan.org).

# Mekanisme Penilaian Yurisdiksi Berkelanjutan: TERPERCAYA

**TERPERCAYA** merupakan seperangkat indikator yang dikembangkan untuk menilai tingkat keberlanjutan dari daerah:

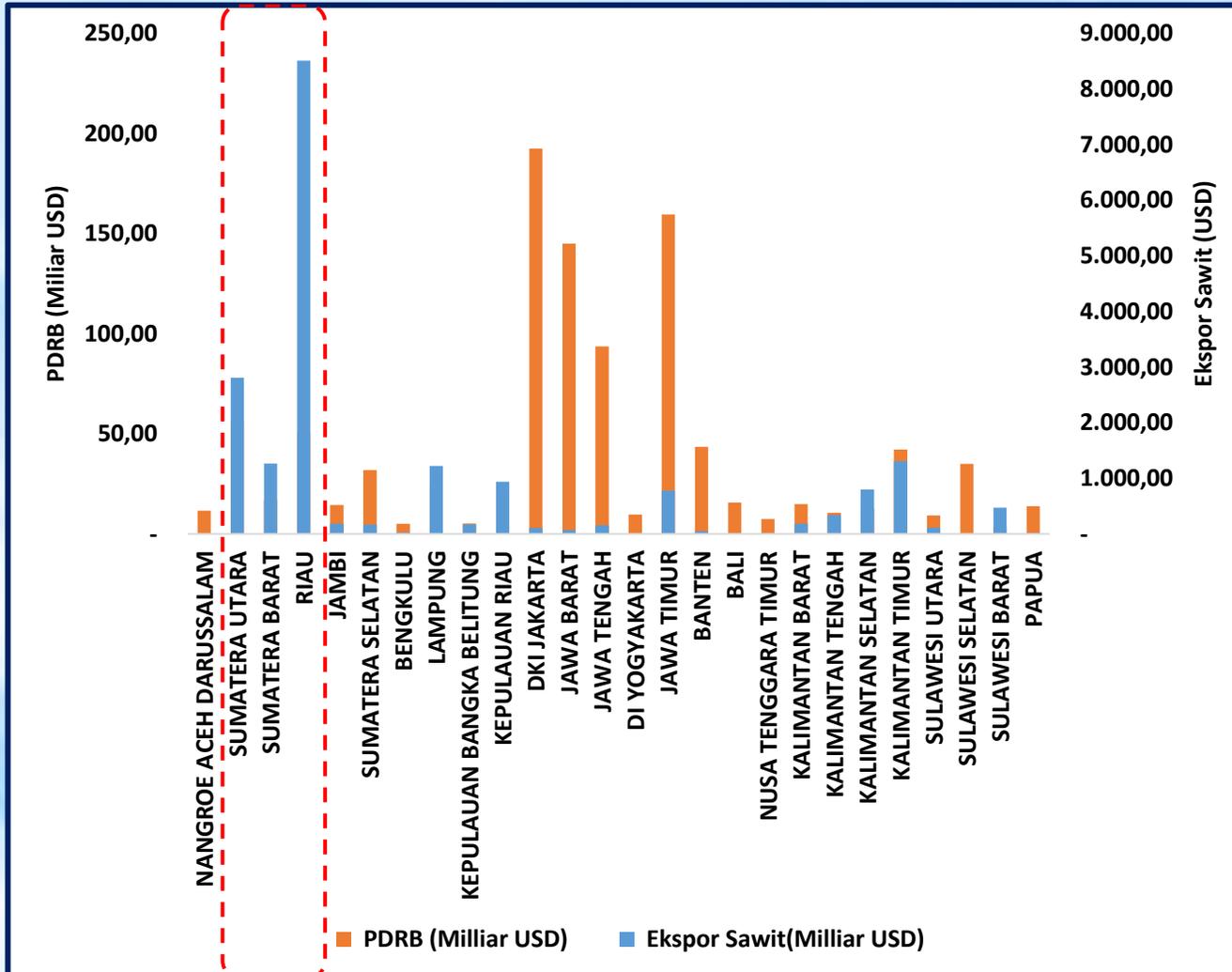
- 4 Pilar & 22 Indikator yang disusun melalui proses multi-pihak
- menjadi dasar untuk penentuan insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah (termasuk penyaluran alokasi transfer ke daerah)



- ✓ **Indikator 18. Proporsi anggaran kabupaten yang dialokasikan untuk keberlanjutan**  
Menilai komitmen pemerintah kabupaten dalam mengactualisasikan berbagai kebijakan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
- ✓ **Indikator 19. Akses informasi publik**  
Mengukur kinerja pemerintah kabupaten dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah akses publik atas informasi
- ✓ **Indikator 20. Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten**  
Menilai sejauh mana komitmen pemerintah daerah di dalam mengactualisasikan kewajiban untuk melibatkan masyarakat di dalam proses perencanaan di yurisdiksinya
- ✓ **Indikator 21. Mekanisme pengaduan**  
Memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan dan kebijakan seputar produksi komoditas perkebunan berkelanjutan pada yurisdiksinya
- ✓ **Indikator 22. Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan**  
Melihat sejauh mana pemerintah daerah di suatu yurisdiksi telah mengupayakan perencanaan pembangunan wilayahnya secara inklusif dan berkelanjutan

# Rendahnya Kontribusi Kelapa Sawit Terhadap Pembangunan Daerah

Hal ini terlihat dari tidak adanya korelasi antara tingginya nilai ekspor sawit pada suatu provinsi dengan PDRB provinsi tersebut



## Berbagai isu yang teridentifikasi:

- ✓ **Belum ada peraturan tentang DBH dari kelapa sawit** (DBH Sumber Daya Alam hanya dari kehutanan, migas, minerba, panas bumi dan perikanan)
- ✓ **APBD yang bersumber dari kelapa sawit hanya berasal dari pajak** (PBB perkebunan, PPh, PPN dan Bea Keluar)
- ✓ **Penerimaan terbesar dari sawit berasal dari pungutan ekspor dikelola oleh BPDPKS dan dimanfaatkan untuk:** (Perpres 61 tahun 2015)
  - Pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit
  - Penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit
  - Promosi perkebunan kelapa sawit
  - Peremajaan perkebunan kelapa sawit
  - Sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit

Sumber: Kementan, BPS



# Penutup

1

Pendekatan yurisdiksi berkelanjutan untuk sektor sawit merupakan sebuah strategi baru untuk mencapai keberlanjutan sektor sawit, termasuk dalam pencapaian rantai pasok bebas deforestasi dan optimalisasi penerimaan daerah.

2

Pendekatan yurisdiksi berkelanjutan untuk subsektor sawit perlu terus dilanjutkan penerapannya. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan.

3

Pengkajian lanjutan terhadap mekanisme pembagian penerimaan nasional dan daerah dari sektor sawit perlu dilakukan.

4

Peningkatan penerimaan daerah dari sawit perlu dikuatkan melalui hilirisasi industri sawit yaitu dengan pembangunan pabrik dan kilang minyak sawit.

5

Peningkatan stabilitas penerimaan daerah penghasil sawit perlu dikuatkan pula melalui diversifikasi produk.



**TERIMA KASIH**

# Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah dan Alternatif Mekanisme Transfer Fiskal

## STRATEGI

**Peningkatan kumpulan kegiatan produktif** yang dapat menjadi sumber pajak daerah, dan mengembangkan industri hilir

**Optimalisasi pajak penghasilan** dengan diversifikasi produksi pertanian dan industri hilir

**Berinvestasi** di unit bisnis yang dapat **meningkatkan modal**

Mekanisme **transfer fiskal** antar pemerintah dapat ditingkatkan untuk mendukung kesehatan ekonomi kabupaten yang memprioritaskan keberlanjutan



## MEKANISME TRANSFER FISKAL

### **Pemerintah Pusat ke Daerah:**

- Dana alokasi khusus (DAK)
- Dana alokasi umum (DAU)
- Dana Insentif Daerah (DID)
- Dana bagi hasil (DBH)

### **Provinsi ke Kabupaten:**

Mekanisme Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis (TAPE)\*

### **Kabupaten ke Desa:**

Mekanisme Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) \*

\*sedang dikembangkan

*“Kelapa sawit berkelanjutan dapat menjadi titik awal untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu dilindungi oleh rencana transisi yang mengutamakan efisiensi alih-alih ekspansi, diversifikasi menjadi produk bernilai tambah, dan diversifikasi ke tanaman pangan lain”*  
[\(Climate Policy Initiative, 2019\)](#)

# Studi Kasus Kabupaten Berau

Sektor kelapa sawit Berau menyumbang sekitar **Rp559 miliar** (USD42 juta) terhadap pemerintah pusat pada tahun 2016.

Hanya **Rp 9,77 miliar** (USD 734.955) atau sekitar **2%** total kontribusi pajak Kabupaten Berau masuk Kembali ke Berau melalui **Dana Bagi Hasil (DBH)**, dimana Rp 1.8 miliar merupakan pajak penghasilan pribadi dan Rp 7.94 miliar dari pajak bumi dan bangunan.

Perolehan daerah dari pajak penghasilan dapat ditingkatkan dengan **diversifikasi produksi pertanian** dan **industri hilir**.

Bila seluruh minyak sawit mentah disuling di Kabupaten Berau, maka terdapat peningkatan pendapatan senilai **Rp 405 miliar** (USD 31 juta) dalam pendapatan pajak nasional.